

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Peran

Setiap manusia yang memiliki kedudukan dalam masyarakat selalu mempunyai peranan antar individu dan kelompok. Menurut kamus bahasa Indonesia arti kata peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan (Peter Salim, et.al.,1995:1132).

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Antropologi” bahwa peran diberi arti khusus yaitu peranan khas yang dipentaskan dan ditindakan oleh individu dalam kedudukan dimana ia berhadapan dengan individu- individu dalam kedudukan lain (Koentjaraningrat,1986:169).

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Suatu Pengantar” peranan merupakan suatu aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak- hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka kita menjalankan suatu peran. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
(Soerjono Soekanto, 1990:260).

Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Sedangkan Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan” menjelaskan fungsi peranan sebagai berikut:

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai- nilai, norma- norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Dwi Narwoko,et.al.,2006:160).

Peran yang akan diteliti adalah diorientasikan untuk membimbing seseorang dalam berperilaku. Sedangkan peran organisasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) adalah suatu andil atau fungsi yang dilakukan oleh organisasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) pada tahun 1928- 1933.

2.1.2. Konsep Organisasi Perempuan

Menurut Edgar H. Schein organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan bersama melalui kegiatan pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Edgar H, Schein, 1985: 17).

Pada prinsipnya organisasi dapat dikategorikan menjadi dua yang didasarkan atas sifat dari organisasi tersebut yaitu organisasi formal dan organisasi informal.

Menurut Sukanti Suryochondro yang dimaksud dengan organisasi dalam arti perkumpulan seringkali dimaksudkan dalam pengertian kelompok formal pada umumnya yaitu kelompok manusia yang dengan sengaja dibentuk karena ada kepentingan bersama (Sukanti Suryochondro, 1984: 06).

Dalam organisasi formal, fungsi dan tujuan dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dari jaman ke jaman dapat terarah dan berkembang. Dasar dari organisasi formal adalah organisasi buatan, pimpinan perkumpulan biasanya lebih berlandaskan wewenang hukum.

Organisasi informal adalah kelompok manusia yang ada karena adanya kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Dasar organisasi adalah organisasi tradisional, pemimpin kelompok dalam organisasi ini biasanya berlandaskan kewibawaan dan kharisma. Dalam organisasi informal ini, fungsi dan tujuan tidak dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Koentjaraningrat, 1990: 156).

Gerakan wanita Indonesia mula-mula adalah dilakukan orang perorang, tetapi lambat laun bekerja sendiri-sendiri mencukupi tercapainya cita-cita kemajuan wanita dan meninggikan derajat bangsa bekerjasama dalam suatu organisasi ini sesuai dengan seruan ketiga saudara Kartini yaitu : Roekmini, Kartinah, dan Soemantri di dalam surat edarannya mengajak membentuk suatu perkumpulan agar supaya mengadakan persatuan yang kuat untuk mengabdikan diri pada cita-cita meninggikan derajat bangsa (Sukanti Suryochondro, 1984: 85).

Pendapat tiga saudara Kartini tersebut menunjukkan bahwa organisasi wanita adalah merupakan sarana bagi wanita Indonesia untuk bergerak dalam mencapai kemerdekaan bagi mereka (Sukanti Suryochondro, 1984: 88).

Wanita bergerak dengan membentuk organisasi ditujukan dalam upaya melawan penjajahan bagi wanita untuk mempertinggi nasib dan derajat mereka sebagai makhluk yang sama hak dan kewajibannya. Penjajahan yang dimaksudkan adalah keterbelakangan mereka dalam bidang pendidikan dan perkawinan.

Menurut SK. Trimurti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan organisasi wanita adalah organisasi- organisasi wanita dimaksudkan untuk mengabdikan kepada rakyat jelata, dapat membela nasibnya dari penjajahan (Subagijo, 1982: 11).

Organisasi yang dimaksudkan di atas adalah organisasi- organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengabdikan kepada rakyat jelata untuk menuntut yang seharusnya didapatkan oleh mereka serta membela nasib mereka dari penjajahan yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial maupun oleh laki- laki.

Menurut Sukanti suryochondro bahwa organisasi wanita (perkumpulan wanita) pada umumnya bertujuan mengadakan pertalian untuk berusaha untuk bersama-sama mengusahakan kemajuan wanita, memperluas kepandaian, mencari kesempatan lebih banyak untuk para pemuda memperoleh pendidikan dan menghendaki hilangnya ketidakadilan dalam keluarga dan masyarakat (Sukanti Suryochondro, 1984: 86).

Lama kelamaan tujuan perkumpulan makin luas karena berubah zaman yang menginginkan wanita lebih maju, meningkatkan kepandaian yang diperoleh. Remaja putri harus lebih banyak memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu agar memiliki derajat yang sama dengan pria baik dalam keluarga dan masyarakat.

Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo, organisasi perempuan sebagai wadah aktifitas perempuan sangat meningkatkan emansipasi dan sekaligus memberi peranan sejajar dengan kaum laki- laki. Terbukalah kesempatan untuk melakukan aktifitas diberbagai bidang ekonomi, sosial, kultural dan politik. (Sartono Kartodirdjo, 1997:194).

Organisasi perempuan adalah salah satu bentuk dari kelompok informal (kelompok manusia yang memang ada) dan formal (kelompok manusia yang sengaja dibentuk) yang mempunyai tujuan memajukan perempuan dalam segala bidang.

Menurut Soetomo S. Honggowongso bahwa perjuangan kaum perempuan dalam upaya peningkatan mutu hidupnya itu ditahapkan dalam fase- fase :

1. memasak, menjahit, berhias, memelihara anak, bergaul dan sebagainya, yang oleh orang barat disebut sebagai masa “ om de mante bekoren “ untuk menyenangkan hati kaum pria.
2. masa gerakan femisme (sufragette) berupa perjuangan persamaan hak dengan pria, dengan masa melengkapi sifat kewanitaannya misalnya dengan jalan meningkatkan keterampilan program pokok mencapai hak untuk memperoleh/ melakukan pekerjaan dan memperoleh hak pilih (suffrage) perjuangan untuk dihargai, diperlukan sebagai wanita yang utuh/ lengkap/ penuh.
3. masa gerak terintegrasi/ terpadu, perempuan dan laki- laki berjuang bekerjasama secara bahu membahu untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam gerakan ini perempuan indonesia, terutama sejak sumpah pemuda tanggal 28 oktober 1928 yang diikuti oleh kongres perempuan

pertama tanggal 22 desember 1928 dapat dikatakan melakukan loncatan masa (fassen sprong) karena ciri- ciri gerakan ketiga fase itu terangkum dalam kesatuan gerakan terintegrasi/ terpadu bahu membahu dengan pria menuju pencapaian kemerdekaan bangsa. Melalui kemerdekaan bangsa Indonesia itu menuju cita- cita bangsa yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera. (Soetomo S. Honggowongso, 1990:16- 17).

Organisasi yang akan diteliti ini adalah organisasi yang bersifat formal. Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), dasar dibentuknya organisasi ini adalah untuk mempersatukan organisasi- organisasi perempuan yang ada diseluruh indonesia agar mempunyai wadah atau tepat untuk mempersatukan dan menyalurkan aspirasi mereka terutama dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan indonesia. Karena selama ini organisasi- organisasi tersebut bergerak sendiri- sendiri, belum terarah dan bersifat lokal/ kedacrahan.

Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan organisasi perempuan yang akan diteliti adalah organisasi yang sengaja dibentuk karena ada sesuatu yang ingin diperjuangkan/ organisasi formal. Tujuan utamanya adalah memajukan kaum perempuan dalam segala bidang.

2.1.3. Konsep Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI)

Organisasi perikatan perempuan Indonesia adalah penjelmaan dari hasrat kaum perempuan Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan- perkumpulan untuk mengadakan persatuan yang lebih besar sehingga mereka dapat bekerjasama dan kedudukannya lebih kuat dalam usaha mereka memajukan wanita (Sukanti Suryochondro, 1984: 89).

Menurut pendapat lain organisasi perikatan perkumpulan perempuan Indonesia adalah persekutuan yang berkelanjutan didirikan oleh rapat kongres perempuan Indonesia (Susan Blackburn, 2007: XIIV).

Dari beberapa pendapat di atas maka oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi kongres perikatan perempuan Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk oleh hasrat wanita Indonesia melalui rapat kongres yang tergabung dalam perkumpulan- perkumpulan perempuan Indonesia.

2.1.4. Konsep Pergerakan Wanita

Kata “pergerakan” meliputi semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi secara modern ke arah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia oleh karena tidak puasny dengan keadaan masyarakat yang ada (A.K. Pringgodigdo SH, 1991:06).

Menurut A. K Pringgodigdo, SH dalam bukunya sejarah pergerakan rakyat Indonesia :

Dalam masa pertama dari pergerakan Indonesia, pergerakan wanita hanya berjuang untuk mempertinggi kedudukan sosial. Soal- soal politik seperti hak, pemilihan, sama tidak menjadi perundingan, sebab kaum laki- laki pun tidak mempunyainya, soal kemerdekaan tanah air sama sekali masih jauh dari padanya. Faham tentang budi pekerti, keagamaan, dan adat, masih menjadi rintangan terbesar baginya untuk bertindak ke arah lebih jauh dari pada apa yang dekat- dekat terletak di depannya saja (A.K. Pringgodigdo SH, 1980:19).

Dari kutipan di atas dapat kita lihat bahwa tujuan utama pergerakan wanita Indonesia adalah sebatas berjuang dalam rangka mempertinggi kedudukan sosial di dalam masyarakat, tidak ada maksud lain dalam pergerakan ini. Corak pergerakan wanita dalam masa pertama ini bisa disebut sebagai pergerakan perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, dan memperluas

kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, mempertinggi kecakapan- kecakapan wanita yang khusus. Gerak kemajuan ini dilakukan dengan pelan- pelan dan tidak pernah menyerang, wanita- wanita dari masa pertama umumnya tidak menentang agama Islam, atau kaum laki- laki atau pemerintah jajahan. Pergerakan wanita dalam permulaan adalah gerak orang seorang, sebagai aksi dari beberapa orang perempuan sendiri-sendiri, tidak dalam susunan perkumpulan (A.K. Pringgodigdo SH, 1980:20).

Menurut Sdr. R.A. Soedirman dalam pidatonya dalam kongres pertama tahun 1928 mengenai “Pergerakan Perempuan, Perkawinan dan Perceraian”. Ia mengatakan bahwa:

Tujuan kita kaum perempuan bergerak ini terutama akan memperbaiki nasib kita dalam kehidupan bermasyarakat. Memperoleh hak kita kaum perempuan supaya bisa mempunyai keleluasaan sebagai mahluk ciptaan tuhan. Dengan demikian, kita bersama- sama turut menjunjung derajat kita bersama, derajat bangsa, dan tanah air kita dengan semestinya (Susan Blackburn, 2007:158).

Pada intinya pergerakan wanita Indonesia bertujuan untuk memperbaiki nasib mereka dalam kehidupan bermasyarakat, memperoleh hak mereka sebagai wanita yang juga adalah termasuk warga masyarakat Indonesia tanpa adanya perbedaan antara laki- laki ataupun perempuan.

Pendapat lain mengenai pergerakan wanita Indonesia di dalam buku Indonesia abad 20- 21.

Pergerakan wanita yang mula- mula berupa pergerakan sosial, yaitu suatu pergerakan yang berjuang untuk menaikkan derajat (kedudukan) wanita dalam masyarakat. Sering dinamakan pergerakan emansipasi, yaitu pergerakan yang bertujuan untuk mencapai persamaan derajat antara laki-

laki dan perempuan, terutama yang menyangkut urusan keluarga dan perkawinan, misalnya agar wanita tidak semata-mata menjadi koki bagi keluarganya, agar wanita terhindar dari kawin paksa, agar kebiasaan poligami dihapuskan dan sebagainya (Moedjanto, 1988:53).

Pergerakan wanita dipelopori oleh R.A. Kartini (1879-1904), putri bupati Jepara yang diperistri oleh Rembang Joyodiningrat, yang istrinya juga lebih dari seorang. Menurut pengamatannya wanita mengalami nasib yang buruk karena kurangnya pendidikan mereka, sehingga dalam banyak hal hidup perempuan tergantung kepada laki-laki. Karena itu perbaikan nasib mereka hanya mungkin dicapai kalau pendidikan wanita dikembangkan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pergerakan perempuan dalam penelitian ini adalah semua macam aksi yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia dalam bentuk organisasi dalam upaya memperbaiki hidup untuk bangsa Indonesia karena ketidak puasanya dengan keadaan yang ada, pergerakan tersebut direalisasikan dengan diselenggarakan kongres perempuan Indonesia yang pertama tahun 1928 di Yogyakarta yang menghasilkan perikatan perkumpulan perempuan Indonesia (PPPI).

2.2. Kerangka Pikir

Tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia. Pada tahun itu diadakan kongres perempuan pertama yang diketuai oleh R.A Soekonto, tujuan utama dari diadakannya kongres ini adalah untuk mempersatukan organisasi- organisasi kewanitaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum kongres, beberapa usulan telah diajukan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Tetapi, semua organisasi yang

terlibat dalam kongres tersebut dengan jelas menginginkan dibentuknya suatu persekutuan yang berkelanjutan yang dapat menyatukan perkumpulan-perkumpulan perempuan indonesia.

Berbagai isu utama masalah perempuan dibahas pada rapat terbuka. Topiknya antara lain: kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan bagi anak perempuan. Pada kongres pertama ini yang dibicarakan hanya sebatas pada peningkatan derajat wanita indonesia saja yakni dalam perkawinan dan pendidikan. Sedangkan, bidang politik tidak begitu ditekankan bahkan sama sekali tidak dibahas.

Kongres memutuskan membentuk badan permufakatan, yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang tanpa berurusan dengan masalah politik berniat meningkatkan keadaan perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan dan sosial budaya serta bertujuan untuk meningkatkan keadaan perempuan Indonesia.

Dalam bidang pendidikan peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) antara lain :

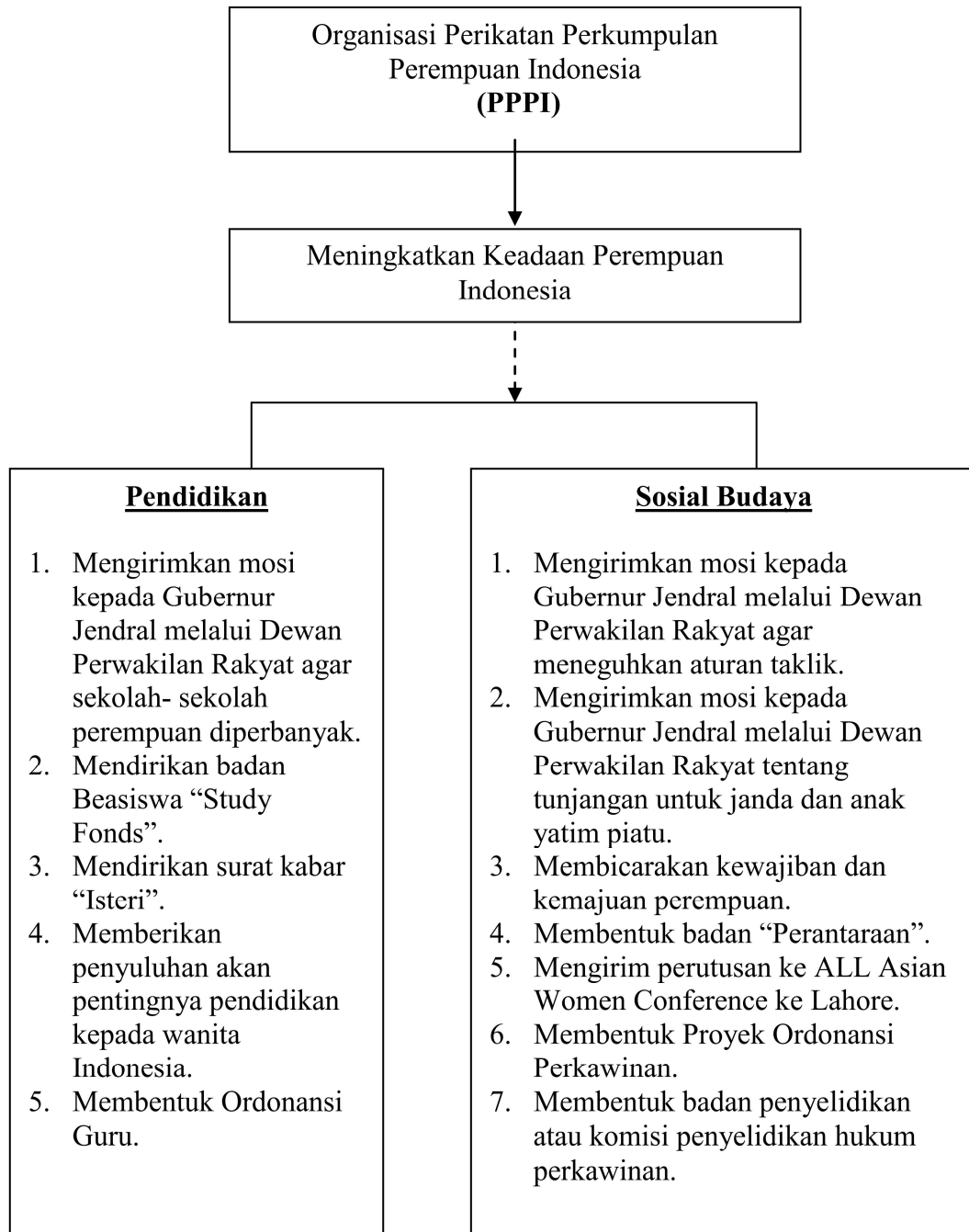
1. Mengirimkan mosi kepada Gubernur Jendral melalui Dewan Perwakilan Rakyat agar sekolah- sekolah perempuan diperbanyak.
2. Mendirikan badan Beasiswa “Study Fonds”.
3. Mendirikan surat kabar “Isteri”.
4. Memberikan penyuluhan akan pentingnya pendidikan kepada wanita Indonesia.

5. Membentuk Ordonansi Guru.

Dalam bidang sosial budaya peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) antara lain :

1. Mengirimkan mosi kepada Gubernur Jendral melalui Dewan Perwakilan Rakyat agar meneguhkan aturan taklik.
2. Mengirimkan mosi kepada Gubernur Jendral melalui Dewan Perwakilan Rakyat tentang tunjangan untuk janda dan anak yatim piatu.
3. Membicarakan kewajiban dan kemajuan perempuan.
4. Membentuk badan “Perantaraan”.
5. Mengirim perutusan ke ALL Asian Women Conference ke Lahore.
6. Membentuk Proyek Ordonansi Perkawinan.
7. Membentuk badan penyelidikan atau komisi penyelidikan hukum perkawinan.

2.3. Paradigma



Keterangan :

—————▶ : Garis Peran

-----▶ : Garis Kegiatan

REFERENSI

- A. K. Pringgodigdo. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta. Halaman 19, 20
- A. K. Pringgodigdo. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia Edisi Pertama*. Dian Rakyat. Jakarta. Halaman 19, 20
- A. K. Pringgodigdo. 1988. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia Edisi Kedua*. Dian Rakyat. Jakarta. Halaman 53
- A. K. Pringgodigdo. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia Edisi Ketiga*. Dian Rakyat. Jakarta. Halaman 06
- Edgar H. Schein. 1985. *Psikologi Organisasi*, PT Pustaka Buriman Presindo. Jakarta. Halaman 17
- G. Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad K 20*. Kanisius. Yogyakarta. Halaman 53
- Sukanti Suryochondro. 1984. *Potret Pergerakan Perempuan Indonesia*. Rajawali. Jakarta. Halaman 06
- Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama. Jakarta*. Yayasan Obor Indonesia. Halaman xiiv
- Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Halaman 158
- Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Halaman 156